

# PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta)

Siti Chodijah

*djdijeh@gmail.com*

Nurul Hidayah

*nurulbadawi2992@gmail.com*

Universitas Mercu Buana

## ABSTRACT

*This study aims to determine: 1). Effect of the use of information technology on the quality of local government financial reporting, 2). The influence of the internal control system of the quality of local government financial reporting. The population in this study are part of the accounting / financial administration at SKPD in Jakarta provincial government amounting to 23 SKPD criteria Have a minimum term of one year in the period of preparation of financial statements. The data used are primary data obtained from respondents through questionnaires. Using quantitative descriptive approach. Karna, the analysis is the analysis of the data used in the form of multiple linear regression tests. The results showed that, simultaneously at variable utilization of information technology and internal control systems significant effect on the quality of local government financial reporting as evidenced from the results of simultaneous test (Test F). Partially shows the results of the use of information technology and internal control systems significant effect on the quality of local government financial reporting as evidenced from the partial test (t test).*

**Keywords:** *Quality of local government financial reporting, use of information technology, internal control systems.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, 2). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 23 SKPD dengan kriteria Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Karna itu, analisis data yang digunakan adalah analisis dalam bentuk uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan pada variable pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah hal ini dibuktikan dari hasil uji simultan (Uji F). Secara parsial menunjukkan hasil pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah hal ini dibuktikan dari uji parsial (Uji t).

**Kata Kunci :** *Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal.*

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2009). Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di pemerintah daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada *stakeholder*. Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah (Indriasari dan Ertambang, 2008).

Menurut (Mardiasmo, 2000) Tujuan dan fungsi pelaporan keuangan pemerintah adalah terpenuhinya beberapa karakteristik sebagai berikut: *Pertama*, kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*). Laporan keuangan pemerintah dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan kepada pemakai informasi dan otoritas lainnya bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan. *Kedua*, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*). Laporan pemerintah hendaknya dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. *Ketiga*, laporan keuangan pemerintah hendaknya dapat memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk mengetahui pengaruh investasi dan alokasi sumber dana terhadap pencapaian tujuan operasional. *Keempat*, laporan keuangan pemerintah hendaknya dapat digunakan untuk memprediksi aliran kas, saldo anggaran (surplus/defisit), dan kebutuhan sumber pendanaan pemerintah dan unit kerja pemerintah. *Kelima*, laporan keuangan pemerintah hendaknya dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah perlu mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah dapat menentukan langkah untuk mengatasi masalah-masalah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan antara lain :

Menurut Rogers (1986) "Teknologi informasi merupakan perangkat keras bersifat organisatoris dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan siapa individu atau khalayak mengumpulkan, memproses, dan saling mempertukarkan informasi dengan individu atau khalayak lain." Pendapat tersebut mengisyaratkan bagaimana teknologi informasi dapat memberikan andil dalam proses komunikasi individu secara efektif, khususnya dalam menembus ruang dan waktu ketika berkomunikasi dengan individu lainnya. Kecenderungannya dalam upaya memperoleh efektivitas komunikasi jarak jauh, seperti *instrumental tools*, atau dalam konteks teknologi informasi, maka teknologi yang digunakan diantaranya komputer dan peranti pendukung lainnya. Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu,

informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono 2005). Informasi akan bermanfaat apabila memenuhi karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*). Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat, telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pada Lampiran II SAP (paragraf 33-37) terdiri dari: 1) relevan artinya informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu; (2) andal, artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; (3) dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya; (4) dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan COSO (2013) pengendalian internal adalah proses karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolut, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna. COSO juga mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut: 1) Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. 2) Keandalan pelaporan keuangan. 3) Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) melakukan penelitian mengenai sistem pengendalian intern pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Hasil penelitian menunjukkan SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan oleh Arfianti (2011), dalam penelitiannya SPI sebagai variabel intervening, sedangkan pada penelitian ini SPI sebagai variabel bebas. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Zetra (2009) dalam Mirnayanti (2013) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik hardware maupun software, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk dapat menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal

tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Dedi (2007) mengenai peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik menunjukkan hasil bahwa kemudahan dalam menggunakan TI tidak selalu memberikan hasil yang positif, dimana pegawai akan menerima TI. Penggunaan TI hanya sekedar alat bantu dan hiburan diwaktu kosong, sehingga penggunaan TI tidak secara maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan skill staf dengan melakukan pelatihan TI secara berkesinambungan dan mengubah budaya *face to face* menjadi *face to technology*. Kondisi ini juga harus didukung dengan kemudahan untuk memperoleh TI dengan harga yang terjangkau dan kemampuan teknologi yang baik. Hasil lainnya juga menunjukkan walaupun pemerintah merasakan manfaat yang diperoleh dari penggunaan TI, tetapi tidak selalu berakhir dengan penggunaan TI. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya rendahnya kemampuan sumber daya manusia, kurangnya dukungan pimpinan maupun peraturan serta masih minimnya dana.

Pada penelitian Zuliarti (2012) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil temuan ini sejalan dengan Indriasari dan Nahartyo (2008), Rosalin (2011), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), serta Nurillah (2014). Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Arfianti (2011) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Institusional**

Teori institusional adalah teori yang menjelaskan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya serta berkeinginan mengungkap realitas ketidakkonsistenan dalam tampilan formal organisasi (Di Maggio & Powell, 1991). Bentuk penyesuaian diri dari suatu organisasi tersebut adalah dengan berusaha menjadi mirip dengan organisasi lain yang biasa disebut dengan *isomorphism*. Menurut DiMaggio & Powell (1983), *isomorphism* adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai

dengan organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Akan tetapi, terkadang *isomorphism* tersebut akan memberikan tekanan institusional pada organisasi, karena mereka harus melakukan perubahan yang sama (homogenitas).

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012), memberikan temuan empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian lainnya pada penelitian Mirnayanti (2013) menemukan bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi seperti pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

**Ha<sub>1</sub>** : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

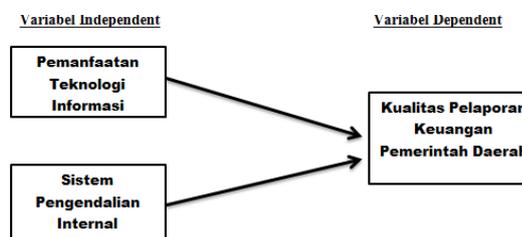
Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders.

Sukmaningrum (2012) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu kriteria pemberian opini laporan keuangan adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

**Ha<sub>2</sub>** : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan survei kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta. Khususnya Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

### Variabel Penelitian

Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Pada penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah pemanfaatan teknologi informasi (X1), dan sistem pengendalian intern (X2).

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi Jakarta.

Menurut sugiyono (2013) "sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang tersebut". Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang bekerja pada bagian keuangan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, terutama aparatur pemerintah bidang akuntansi serta menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Sampel di ambil dari 2 kota karena luasnya wilayah Provinsi DKI Jakarta dan jangkauan penelitian rumit maka sampel penelitian diambil dari 2 kota yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sampel Terdiri dari 23 SKPD Provinsi DKI Jakarta. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing Dinas pada SKPD.
2. Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

### **Pengujian Kualitas Data**

Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya. Umar (2013:131) korelasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment. Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian berperilaku mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah (Harrison, dalam Zulganef, 2006). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas kuesioner digunakan teknik CronbachAlpha.

### **Pengujian Asumsi Klasik**

Pengujian Asumsi Klasik dilakukan guna memenuhi asumsi regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Uji normalitas menggunakan *Grafik P-P Plot* dan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Masalah multikolinearitas diuji dengan melihat nilai *Tolerance* dan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *scatterplot*.

### **Pengujian Hipotesis**

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = kualitas laporan keuangan

$\alpha$  = konstanta

$\beta_1$  = koefisien regresi dari  $X_1$  (pemanfaatan teknologi informasi)

$X_1$  = variabel pemanfaatan teknologi informasi

$\beta_2$  = koefisien regresi dari  $X_2$  (sistem pengendalian intern)

$X_2$  = variabel sistem pengendalian intern

e = standar error

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Uji Kualitas Data**

Jumlah kuesioner yang didistribusikan seluruhnya berjumlah 101 kuesioner dan yang diterima kembali 70 kuisisioner dan 70 kuisisioner ini semua dapat diolah.

### **Hasil Uji Validitas**

Dari hasil uji validitas dalam penelitian ini, diperoleh data yang menyatakan bahwa dari 45 item pertanyaan yang diberikan kepada 70 responden ditemukan nilai *Correlated Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,2352 ( $r_{tabel}$ ) yang berarti valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden dari setiap pertanyaan tiap variabel pada penelitian ini mampu mengukur apa yang diinginkan oleh responden.

### Hasil Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien *alpha* ( $\alpha$ ) yang cukup besar yaitu  $> 0,70$  sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

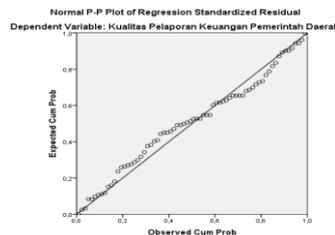
### Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	70	17	36	28,67	4,096
X2	70	34	100	74,89	14,851
Y	70	23	77	57,64	12,311
Valid N (listwise)	70				

Tabel ini menjelaskan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi, jawaban minimum responden sebesar 17 dan maksimum sebesar 36, dengan rata-rata total jawaban 28,67 dan standar deviasi 4,096. Variabel sistem pengendalian internal jawaban minimum sebesar 34 dan maksimum sebesar 100, dengan rata-rata total jawaban 74,89 dan standar deviasi 14,851. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah jawaban minimum sebesar 23 dan maksimum sebesar 77, dengan rata-rata total jawaban 57,64 dan standar deviasi 12,311.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas



Dari grafik P-P Plot diatas terlihat bahwa sebaran data memusat pada nilai rata-rata dan median atau nilai P-P terletak digaris diagonal, maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini memiliki penyebaran dan terdistribusi normal. Dengan normalnya data pada penelitian ini maka penelitian ini dapat diteruskan. Untuk menegaskan hasil uji normalitas diatas maka peneliti melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan hasil sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,32031244
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,077
	Negative	-,085
Kolmogorov-Smirnov Z		,711
Asymp. Sig. (2-tailed)		,693

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* diatas, terlihat nilai *Asymp. Sig* memiliki nilai  $0,693 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal dan model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah berdasarkan masukan variabel independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. Maka data penelitian layak digunakan sebagai penelitian.

### Uji multikolonieritas

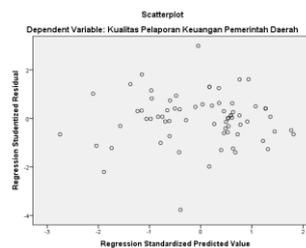
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-14,058	2,894			
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,117	,166	,372	,357	2,801
Sistem Pengendalian Internal	,530	,046	,639	,357	2,801

a. Dependent Variable: Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Sumber: Data primer yang ditolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai *Tolerance* semua variabel independen  $> 0,10$  dan nilai *VIF* semua variabel independen  $< 10,00$ , yang ditunjukkan dengan nilai *Tolerance* untuk pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,357, dan sistem pengendalian internal sebesar 0,357. Serta nilai *VIF* pemanfaatan teknologi informasi sebesar 2,801 dan sistem pengendalian internal sebesar 2,801. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat problem multiko atau dapat dikatakan bebas dari problem multikolonieritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 4.2 grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,963 <sup>a</sup>	,927	,925	3,370

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Dependent Variable: Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terlihat pada tabel 4.11 diatas, angka *Adjusted R Square* adalah 0,925. Hal ini berarti 92,5% variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Sedangkan sisanya  $100\% - 92,5\% = 7,5\%$  dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### a. Hasil Uji Signifikan simultan (Uji Statistik F)

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji statistik F)  
ANOVA\*

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9697,383	2	4848,691	427,063	,000 <sup>a</sup>
	Residual	760,689	67	11,354		
	Total	10458,071	69			

a. Dependent Variable: Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.12 hasil perhitungan diperoleh signifikansi sebesar 0,000<sup>b</sup>. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 maka nilai signifikansi F sebesar 0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), dan nilai  $F_{hitung} 427,063 > F_{tabel} 3,93$ . Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas pemanfaatan teknologi informasi ( $X_1$ ) dan sistem pengendalian internal ( $X_2$ ) secara simultan terhadap variabel terikat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $Y$ ) dapat diterima.

#### b. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji statistik t)  
Coefficients\*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-14,058	2,894		-4,857	,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,117	,166	,372	6,741	,000
Sistem Pengendalian Internal	,530	,046	,639	11,585	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Hasil perhitungan diperoleh untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_1$ ) dengan signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), dan nilai  $t_{hitung} 6,741 > t_{tabel} 1,995$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil perhitungan diperoleh untuk variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) dengan signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), dan nilai  $t_{hitung} 11,585 > t_{tabel} 1,995$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 adalah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi diatas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -14,058 + 1,117X_1 + 0,530X_2$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta **-14,058** akan diabaikan apabila nilai ( $X$ ) minimal 1, karena dalam penelitian ini menggunakan

skala likert antara 1 sampai 5 dengan nilai terendah 1. Angka koefisien regresi **1,117** menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_1$ ) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar **1,117** kali. Angka koefisien regresi **0,530** menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai variabel sistem pengendalian internal ( $X_2$ ) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar **0,530** kali.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dan uji statistik induktif dalam penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Dapat diketahui bahwa adanya pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Disamping itu jika dilihat dari hasil perhitungan secara parsial (individu) untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_1$ ) dengan signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), dan nilai  $t_{hitung} 6,741 > t_{tabel} 1,995$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata telah mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Agar pelaporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik tersebut, maka perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Windyaningrum dan Rahmawati (2010) mengemukakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Penelitian Indriasari dan nahartyo (2008) mengemukakan bahwa suatu entitas akuntansi seperti pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah,

### **2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dapat diketahui bahwa adanya pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Disamping itu jika dilihat dari hasil perhitungan secara parsial (individu) untuk variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) dengan signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), dan nilai  $t_{hitung}$  11,585  $>$   $t_{tabel}$  1,995. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian internal ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada kenyataannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menjalankan kegiatan pengendalian sesuai yang digariskan oleh peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan pengendalian intern pada setiap SKPD mampu dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Sukmaningrum (2012) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu kriteria pemberian opini laporan keuangan adalah evaluasi atas eektivitas SPI.

## PENUTUP

### SIMPULAN

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam pemanfaatan teknologi informasi para aparatur harus memahami teknologi informasi secara keseluruhan dan akuntan SKPD harus mematuhi sistem pengendalian internal karna merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar sehingga akan memperoleh kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang baik dan mengurangi temuan-temuan yang diperoleh BPK.
2. Bagi para peneliti yang tertarik atau ingin menggunakan variabel-variabel yang sama dalam penelitiannya, diharapkan untuk memperluas dan memperbanyak jumlah populasi dan sampel. Harus lebih memperbanyak referensi yang berkaitan dengan variabel baik itu referensi dari lokal maupun dari internasional. Jika ingin melakukan penelitian di wilayah Provinsi DKI

Jakarta, terlebih dahulu untuk mendapatkan ijin penelitian dari BPTSP yang berada di kota masing-masing Provinsi DKI Jakarta. Kemudian setelah mendapatkan ijin dari BPTSP, peneliti selanjutnya harus menjadwalkan jauh-jauh hari dari jadwal batas penelitian untuk mendapatkan ijin penelitian dari Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat banyaknya peneliti lain yang juga ingin meneliti di wilayah yang sama sehingga untuk memperoleh ijin penelitian sedikit lama ataupun pegawai yang memberikan otoritas sedang dinas keluar sehingga penelitian menjadi kurang lancar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang*. Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang
- Carruthers, B.G. 1995. Accounting, Ambiguity, and The New Institutionalism, *Accounting, Organizational and Society* 20 (4): 313-328
- Darmawan, Deni (2015). *Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Badan Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- DiMaggio, P.J. & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *The New Institutionalism in Organizational Analysis* (p.63-82). The University of Chicago Press: Chicago.
- Dewi, I. & Poppy, S. K. (2014). *The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting And Its Impact On The Performance Accountability In Local Government (Survey Of All Units Local Government In Tegal City – Central Java Province- Indonesian)* South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 5, Issue 1 (Dec.) ISSN 2289-1560.
- Erma, S. & Shinta, P. S. (2014). *Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi. (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)* Seminar Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-Feb Ums, 25 Juni 2014. ISBN: 978-602-70429-2-6
- Ghozali, Imam (2013) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Badan Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Badan Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Husein, Umar (2013) *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Badan Penerbit: RajaWali Pers, Jakarta
- Indra Bastian. (2006) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* Badan Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. (2008). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah: Studi Pada Pemerintahan Kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir*. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Kadir, A., & Triwahyuni, T. Ch. (2013) *Pengantar Teknologi Informasi*. Badan Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Mahdi, S & Elahi, T (2009). *The Role of Information Technology in Financial Reporting Quality: Iranian Scenario*, pp 116-118, viewed 24 March 2013, (<http://www.hrca.hr/file/126164>)
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nina E. W., & Helmy, A. (2015) *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Perspektif Teori Institusional: Studi kasus pada kabupaten pemerintah malang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Nuryanto, Muhamad, and Nunuy Nur Afiah. (2013). *The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province -Indonesia)*. World Review of Business Research Vol. 3. No. 4. Issue. Pp. 157 – 171.
- Ramdany (2015). *Influence The Quality of Accounting Information Systems and The Effectiveness of Internal Control On Financial Reporting Quality*. Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 Vol.6, No.6, 2015
- Ratmono, D., & Sholihin, M. ( 2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Badan Penerbit UIPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Rosalin, F. & Kawedar, W. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*. Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro. Diunduh dari <http://eprints.undip.ac.id/29439/1/jurnal.pdf>. Diunduh tanggal 7 Oktober 2013.
- Salehi M, Moradi, M and Ariyanpour A (2010). *A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting: Empirical Evidence of Emerging Economy*, Global Journal of Management and Business Research, Vol. 10, No. 1, pp. 148-158
- Salehi M, Rostami, V and Mogadam A (2010). *Usefulness of Accounting Information System in Emerging Economy: Empirical Evidence of Iran*, International Journal of Economic and Finance, Vol. 2, No. 2, pp. 186-195.
- Sekaran, Uma (2006) *Research Methods For Business*. United States of America: John Wiley & Sons
- Sugiyono (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Badan Penerbit Alfabeta, Bandung,
- Sukmaningrum (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang*, Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Winidyaningrum & Rahmawati (2010) *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi informasi, Terhadap Keterandalan dan Ketepatan waktu dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi: Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

*Internal Control-Integrated Framework, 1992:13; Cangani et al, 2003 :65*

*Internal Control-Integrated Framework, COSO 2013*

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Pengendalian intern pada Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No 15 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

<http://economy.okezone.com/read/2016/04/12/20/1360616/bpk-catat-penurunan-wtp-laporan-keuangan-pemda-2015>

<http://dprd-dki.jakartaprov.go.id/gubernur-dki-jakarta-menghormati-opini-bpk-ri/>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/01/17334891/untuk.ketiga.kalinya.laporan.keuangan.dki.jakarta.dapat.opini.wdp.dari.bpk>

<http://www.antaraneWS.com/berita/564644/laporan-keuangan-dki-2015-dapat-opini-wdp>